



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **PERUBAHAN** **2018-2023**

2019

2022

2021

2023

2020

**DISKOMINFO PERSANTIK
KABUPATEN KATINGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sesuai Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2018-2023 dan sebagai tolak ukur bagi pihak berwenang dalam menilai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun untuk mengantisipasi kondisi dan prediksi yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

KEPALA DINAS,



WIM, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19651110 199103 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
B A B I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
B A B II GAMBARAN PELAYANAN SOPD	15
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKASTATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN	15
2.2. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN	26
2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN.....	50
B A B III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KATINGAN.....	52
3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	53
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	59
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	60
B A B IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN.....	62
B A B V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
B A B VIII PENUTUP.....	79

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Rencana Strategis Dinas memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan 2018-2023. Hubungan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta indikasi rencana program lima tahunan meliputi kebijakan dan program SOPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan program lintas SOPD.

Setiap pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam penggunaan berbagai sumber daya secara efisien, ekonomis dan efektif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit organisasinya.

Pertanggungjawaban penggunaan berbagai sumber daya tersebut yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan unit organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam pengertian bahwa setiap proses pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terbuka dan menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 mengacu kepada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **“Katingan Bermartabat untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”**. **BERMARTABAT (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN, AMAN DAN TERBUKA)**. Terkait dengan visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Katingan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam berhubungan dengan pelayanan di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian pada **Misi 5 (Kelima) “Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih dan Komunikasi**.

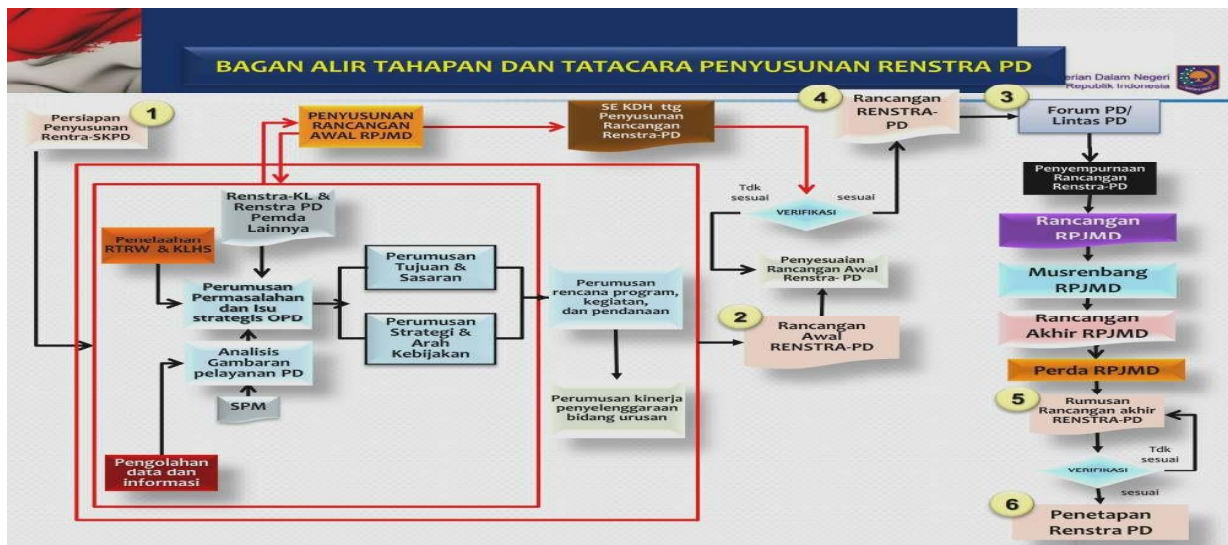
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mempunyai tujuan Terwujudnya Sistem Pemerintahan Kabupaten Katingan Berbasis Elektronik, dengan Sasaran Pengembangan E-Government menuju Kota Cerdas, Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi, Peningkatan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Data Statistik Sektoral, Pemenuhan Sumber Daya Persandian.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah Pemanfaatan Jaringan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka penyelenggaraan E-Government, Peningkatan Sumber Daya dan Regulasi Informasi dan Komunikasi Publik, Peningkatan Pengamanan Informasi/data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

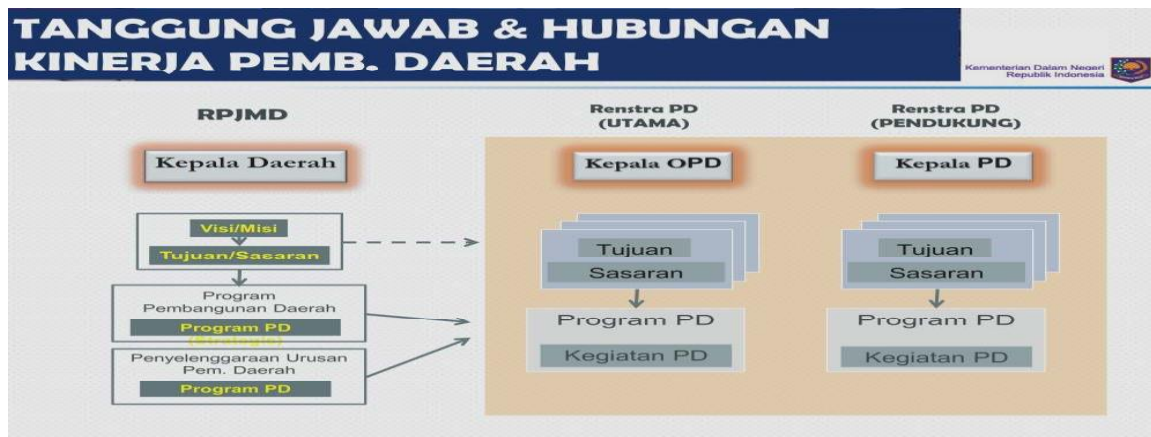
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Persandian. Dalam perannya sebagai Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan globalisasi, informasi dan perkembangan di segala bidang merupakan tuntutan dan tantangan tetapi juga sekaligus peluang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat digunakan sebagai media informasi menyebarluaskan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Dinas publik secara berkala, serta dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu.

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota



Gambar 1.2. Tanggung Jawab & Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Gambar 1.3. Materi Penyusunan Renstra



Setiap pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam penggunaan berbagai sumber daya secara efisien, ekonomis dan efektif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Pertanggungjawaban penggunaan berbagai sumber daya tersebut yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan unit organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam pengertian bahwa setiap proses pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terbuka dan menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013 - 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah Dokumen Perencanaan dalam 5 (Lima) Tahun yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
3. Untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar unit kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
4. Untuk bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan 2018-2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang petunjuk penyusunan Rencana Strategis SOPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP.

B A B I I

GAMBARAN PELAYANAN SOPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati Katingan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya;
4. Melaksanakan koordinasi, integrasi, simlikasi dan sinkronisasi dibidang tugasnya;

5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian;

Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Wali Kabupaten Katingan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan, yang meliputi :

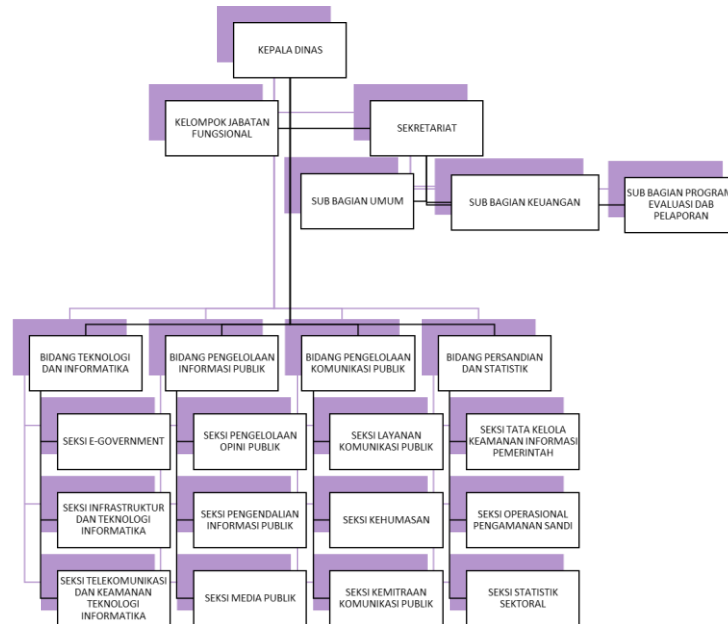
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Jabatan Fungsional Perencana
- c. Bidang Teknologi dan Informatika
 1. Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
 1. Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 1. Jabatan Fungsional
- f. Bidang Persandian dan Statistik
 1. Jabatan Fungsional

Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, layanan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

- b. Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, SAKIP, LKIP, dan menyiapkan bahan LKPJ, LPPD, menyusun SPM, SOP, RKA serta DPA di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.
- c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi, serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran.
- e. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pengawasan dibidang layanan informasi publik, kehumasan dan kemitraan komunikasi publik.
- f. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai persandian dan statistik.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN



2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

1. Kepegawaian

- a. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 27 personil PNS dan 18 Tenaga Kontrak. Jenjang Jabatan dan kepangkatan, susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Data Nominatif Personil merupakan Unsur Pelaksana Tugas di bidang Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sumber daya manusia yang sangat penting dalam keberhasilan tugas.

c. Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SMP	1
3.	SMU/MA	3
5.	D-3	3
6.	S-1	17
7.	S-2	4
	TOTAL	28

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Pelaksana

No.	Eselon/ Pelaksana	Jenis Pendidikan						Jumlah
		SD-SMP	SMA- SMK	D-3	S-1	S-2	S-3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	1	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	3	2	-	5
3.	Eselon IV	-	-	1	12	1	-	14
4.	Fungsional Umum	1	3	2	2	-	-	8
5.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1	3	3	17	4	-	28

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Gol. Ruang

No.	Gol. Ruang			Jumlah	Pangkat
1.	IV	e	-	4	-
		d	-		-
		c	1		Pembina Utama Muda
		b	-		Pembina Tingkat I
		a	3		Pembina
2.	III	d	8	20	Penata Tingkat I
		c	7		Penata
		b	2		Penata Muda Tingkat I
		a	3		Penata Muda
3.	II	d	-	3	-
		c	1		Pengatur
		b	1		Pengatur Muda Tingkat I
		a	1		Pengatur Muda
4.	I	c	1	1	Juru
Total				28	

2. Kelengkapan

Sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak kalah pentingnya, karena untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta kenyamanan dalam bekerja, berikut merupakan Daftar Inventaris Barang Dinas.

**DAFTAR INVENTARISASI BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DANPERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018**

Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merek/ type	Bahan	Tahun Catat/ beli	Kondisi Barang
2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.05.02.01.024	MEJA BIRO	0001	-	KAYU	2003	Baik
1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	0001	-	KAYU	2003	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT	0005	CRYSTAL	BESI/PLASTIK	2003	Rusak Berat
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT	0006	CRYSTAL	BESI/PLASTIK	2003	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.002	TELEVISI 14"	0001	HOYA	PLASTIK/KACA	2003	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.008	SOUND SYSTEM (KARAOKE MIXER + AMPLIFIER)	0001	TOA	BESI	2003	Rusak Berat
1.3.2.05.03.06.005	KURSI TAMU DI RUANG PEJABAT ESELON III	0001	-	KAYU	2003	Baik
1.3.2.05.01.05.077	PAPAN PENGUMUM AN	0001	-	KAYU	2004	Baik
1.3.2.05.02.03.001	MESIN PENGHISAP DEBU	0001	PANASON IC	PLASTIK	2004	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT 1/ 2pk	0003		BESI/PLASTIK	2004	Baik
1.3.2.05.02.04.006	KIPAS ANGIN TEMPEL	0001	UCHIDA	PLASTIK	2004	Rusak Berat
1.3.2.05.02.04.006	KIPAS ANGIN TEMPEL	0002	UCHIDA	PLASTIK	2004	Rusak Berat
1.3.2.02.01.02.003	Mobil Suzuki Cary ST 150	0001	Suzuki	Besi	2005	Baik

1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0001	TOSHIB A	BESI/PLASTIK	2005	Rusak Berat
1.3.2.05.02.01.008	MEJA RAPAT	0001	-	KAYU	2006	Rusak Berat
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 2PK	0004	LG	BESI/PLASTIK	2006	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.008	SOUND SYSTEM (KARAOKE MIXER + AMPLIFIER) + CD PLAYER VITRON	0002	DAT	PLASTIK	2006	Rusak Berat
1.3.2.05.01.01.01	MEJA TELEVISI	0001	-	-	2007	Baik
1.3.2.05.02.01.032	KURSI PUTAR	0001	-	-	2007	Baik
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI ARSIP	0003	-	KAYU	2007	Baik
1.3.2.05.02.04.015	AC	0001	-	-	2007	Rusak Ringan
1.3.2.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR YAMAHA	0008	YAMAHA	-	2008	Baik
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU / LEMARI TV 2 PINTU	0001	-	KAYU	2008	Baik
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU	0006	-	KAYU	2008	Baik
1.3.2.05.02.01.050	ALMARI	0014	-	-	2008	Baik
1.3.2.05.02.04.001	KULKAS	0001	LG-	-	2008	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 2PK	0001	PANASONIC	BESI/PLASTIK	2008	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 2PK	0003	PANASONIC	BESI/PLASTIK	2008	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 2PK	0007	PANASONIC	BESI/PLASTIK	2008	Rusak Berat
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 2PK	0008	PANASONIC	BESI/PLASTIK	2008	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.002	TELEVISI	0002	LG	-	2008	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.048	HANDYCAM	0001	Sony DCR- SR	BESI/PLASTI K	2008	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0002	QOMPAC	BESI/PLASTI K	2008	Rusak Berat

1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0001 0003	EPSON T.11 + INFUS	PLASTIK / BESI	2008	Rusak Berat
1.3.2.10.02.03.018	UPS	0003	-	BESI	2008	Rusak Berat
1.3.2.10.02.03.018	UPS	0004	-	BESI	2008	Rusak Berat
1.3.2.10.02.03.018	UPS	0005	-	BESI	2008	Rusak Berat
1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor SUZUKI SMASH	0002	SUZUKI SMASH	Besi	2009	Baik
1.3.2.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X125	0003	HONDA	BESI	2009	Baik
1.3.2.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR HONDA MEGA PRO	0004	HONDA	BESI	2009	Baik
1.3.2.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR HONDA SUPR X 125	0005	HONDA	BESI	2009	Baik
1.3.2.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR HONDA MEGA PRO	0006	HONDA	BESI	2009	Baik
1.3.2.02.01.04.001	SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X 125	0007	HONDA	BESI	2009	Baik
1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor SUZUKI SMASH	0009	SUZUKI SMASH	-	2009	Baik
1.3.2.05.01.01.01	GORDEN / VERTIKAL BLIND	0002	-	PLASTIK/KERTAS	2009	Rusak Berat
1.3.2.05.01.01.01	TERALIS	0010	-	BESI	2009	Rusak Berat
1.3.2.05.02.01.032	KURSI PUTAR	0001	USHINTO	BESI/PLASTIK	2009	Baik
1.3.2.05.02.01.032	KURSI PUTAR	0001	USHINTO	BESI/PLASTIK	2009	Baik
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU / ARSIP 4 PINTU	0001	-	KAYU	2009	Baik

1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU / ARSIP 4 PINTU 2009	0007	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU / ARSIP 4 PINTU	0008	-	KAYU	2009	Rusak Berat
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU / ARSIP 4 PINTU	0008	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.05.02.01.050	LEMARI KAYU / ARSIP 4 PINTU	0009	-	KAYU	2009	Rusak Berat
1.3.2.05.03.01.005	MEJA KERJA	0001	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.05.03.01.005	MEJA KERJA	0001	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.05.03.01.005	MEJA KERJA	0003	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.05.03.01.005	MEJA KERJA	0004	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.05.03.01.005	MEJA KERJA	0005	-	KAYU	2009	Baik
1.3.2.06.03.09.001	RADIO UHV	0001	-	BESI	2009	Rusak Ringan
1.3.2.10.01.02.001	KOMPUTER PC	0005	LG	-	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.001	KOMPUTER PC	0006	LG	-	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.001	KOMPUTER PC	0007	LG	-	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.001	KOMPUTER PC	0008	LG	-	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0003	TOSHIBA	BESI/PLASTIK	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0004	TOSHIBA	BESI/PLASTIK	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0005	TOSHIBA	BESI/PLASTIK	2009	Rusak Berat
1.3.2.10.01.02.002	LAPTOP	0007	TOSHIBA	BESI/PLASTIK	2009	Baik
1.3.2.05.01.01.01	TERALIS	0011	-	BESI	2010	Rusak Berat
1.3.2.05.02.03.003	MESIN PEMOTONG RUMPUT	0001	STHIL	BESI	2010	Baik

1.3.2.05.02.03.003	MESIN PEMOTONG RUMPUT	0002	STHILL	BESI	2010	Baik
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0004	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Rusak Ringan
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0005	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Rusak Ringan
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0006	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Rusak Ringan
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER +STAVOL	0007	EPSON LX-300+II / LEXUS svc 1000	PLASTIK/BESI	2010	Rusak Ringan
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0008	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Rusak Ringan
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0009	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Baik
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER	0010	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Baik
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER EPSON LQ2190	0012	EPSON LQ-2190	PLASTIK/BESI	2010	Baik
1.3.2.10.02.03.003	PRINTER CANON IP2770	0013	CANON iP2770	PLASTIK/BESI	2010	Baik
1.3.2.05.01.01.01	LCD PROYEKTOR	0001	INFOCUS	PLASTIK/BESI	2011	Rusak Berat
1.3.2.05.01.01.01	LAYAR PROYEKTOR	0002	-	PLASTIK/BESI	2011	Rusak Berat
1.3.2.05.01.01.01	GORDEN VERTIKAL BLIND	0005	-	PLASTIK/KER	2011	Rusak Berat
1.3.2.05.01.01.01	PENANGKAL PETIR / GROUNDING	0009	-	BAJA	2011	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 1PK	0007	LG	BESI/PLASTIK	2011	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT	0008	LG	BESI/PLASTIK	2011	Baik
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT 1/2 PK	0009	LG	BESI/PLASTIK	2011	Rusak Berat
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT 1/2 PK	0012	LG	BESI/PLASTIK	2011	Rusak Berat
1.3.2.05.02.04.004	AC SPLIT / 1PK	0013	LG	BESI/PLASTIK	2011	Rusak Berat

1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0001	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Baik
1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0001	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Baik
1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0004	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0005	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0006	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0007	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Rusak Berat
1.3.2.05.02.06.038	DISPENCER GALON	+	0009	MIYAKO	PLASTIK/KER	T 2011	Baik
1.3.2.05.03.06.004	KURSI TAMU DI RUANG PEJABAT ESELON II		0001	-	ROTAN	2011	Baik
1.3.2.02.01.01.003	MOBIL AVANZA VELOZ		0001	Toyota	-	2012	Baik
1.3.2.02.01.02.003	MOBIL APV		0002	SUZUKI	-	2012	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan.

Kinerja Pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangannya seperti yang tertuang dalam Revisi RPJM dengan mengacu pada indikator kinerja sesuai dengan target MDGs dan Undang –Undang.

Pada bagian ini, tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan periode sebelumnya,. Adapun tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan (tabel 2.3.1.) disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke		Rasio Pada Tahun ke	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Layanan Komunikasi (%)			50	55	29	30	0.58	0.54
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan (%)			0	47	0	47	0	100
3	Persentase Data Statistik yang terpublikasi (%)			3	5	3	5	100	100
4	Persentase Penggunaan sandi dalam berkomunikasi (%)			0	5	0	5	0	100
6	Tersedianya Buku Katingan dalam Angka			30	50	30	50	100	100

TABEL 2.3.2. TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN SOPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara Realisasi Capaian pada Tahun	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.981.858.000	2.315.889.275	1.716.383.774	2.130.947.917	86.60	92.01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.075.000	26.00.000	23.963.000	21.829.000	91.90	83.96
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.100.000	0	41.870.000	0	94.94	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.413.000	163.288.000	39.900.000	154.300.000	66.05	94.66
5	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	418.000.000	6.311.616.200	375.013.900	6.004.108.220	89.72	95.13
6	Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	13.600.000	0	9.600.000	0	70.59	0
7	Penelitian dan Statistik Daerah	120.000.000	98.750.000	119.200.000	85.250.000	99.33	86.33
	Jumlah	2.864.046.000	8.915.903.475	2.325.930.674	8.396.435.137	87.31	94.17

Tabel 2.3.3. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Pada Tahun ke				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I	IKU Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan															
1	Persentase Jumlah PD dan Desa yang Terkoneksi Internet	49.07%	46,48 %	45.34 %	42.48 %	42.24 %	100%	100%	100%	100%	100%	2.03 %	2.15 %	2.20 %	2.35 %	2.36 %
2	Indeks Layanan Informasi Publik	65.62	70.06	74.5	78.94	83.38	100%	100%	100%	100%	100%	1.52 %	1.42 %	1.34 %	1.26 %	1.19 %
3	Jumlah Layanan Komunikasi Publik	3 Layanan	4 Layan an	4 Layan an	5 Layan an	6 Layan an	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33.3 3%	25%	25%	20%	16.6 6%
II	Urusan Statistik															
	Persentase Data Statistik Sektorial Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	78.95%	84.21 %	86.84 %	89.47 %	92.11 %	100%	100%	100%	100%	100%	1.26 %	1.18 %	1.15 %	1.11 %	1.08 %
III	Urusan Persandian															
	Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah	15%	25%	35%	40%	45%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	6.66 %	4%	2.85 %	2.5%	2.22 %

Berikut disampaikan detail data capaian kinerja pelayanan yang dikategorikan per urusan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Pembentukan PPID

Berdasarkan Nomenklatur baru pada Tahun 2017 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi baru bergabung pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Dan pencapaian kinerja baru ada pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah membuka kran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembuka yang ada di setiap SOPD dan Kecamatan sebagai penyedia informasi publik.

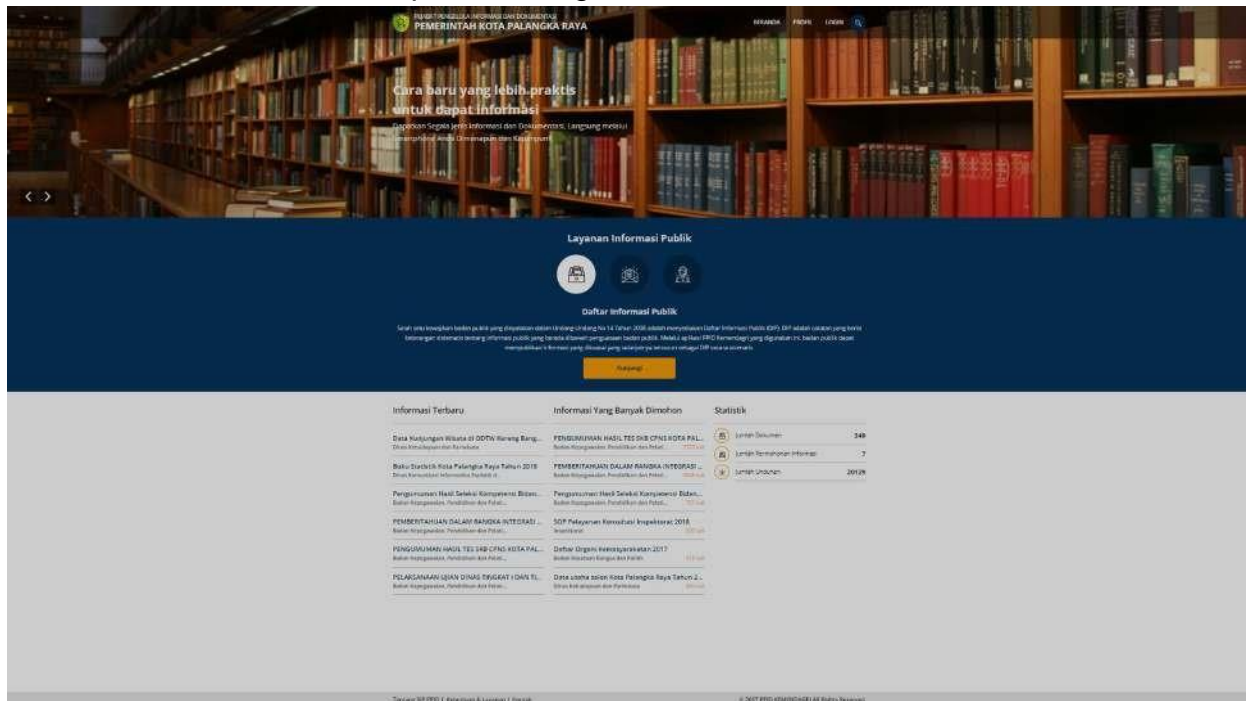
**Tabel 2.3.2.
Daftar Nama SOPD Yang sudah Membentuk PPID**

NO	NAMA PD
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Dinas Sosial
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
4	RSUD Mas Amsyar
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
7	Dinas Kesehatan
8	Dinas Pendidikan
9	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
10	Inspektorat Kab. Katingan
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
16	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Katingan
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Katingan
19	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Katingan
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Katingan
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemkab Katingan
22	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Katingan

NO	NAMA PD
23	Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Katingan
24	Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan
25	Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan
26	Kecamatan Katingan Hilir Pemkab Katingan
27	Kecamatan Kamipang, Desa Baon Bango
28	Kantor Camat Tasik Payawan
29	Kecamatan Pulau malan, Desa Buntut Bali
30	Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pendahara
31	Kecamatan Katingan Tengah, Tumbang Samba
32	Kecamatan Bukit Raya
33	Kecamatan Petak Malai
34	Kecamatan Marikit
35	Kecamatan Sanaman antikei
36	Kecamatan Mendawai
37	Kecamatan Katingan Kuala
38	Kecamatan Katingan Hulu

(Sumber : Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik,)

Website PPID Kabupaten Katingan

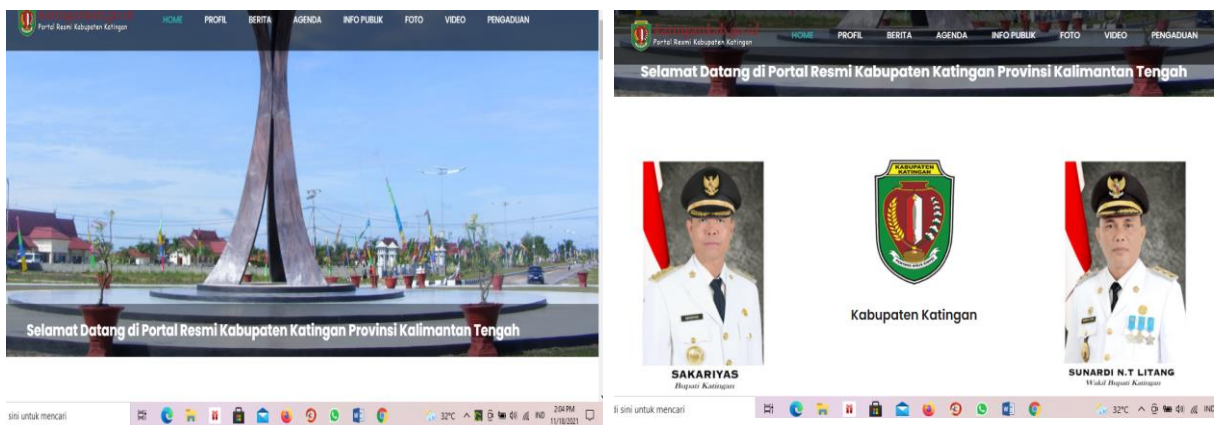


(Sumber : Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik,)

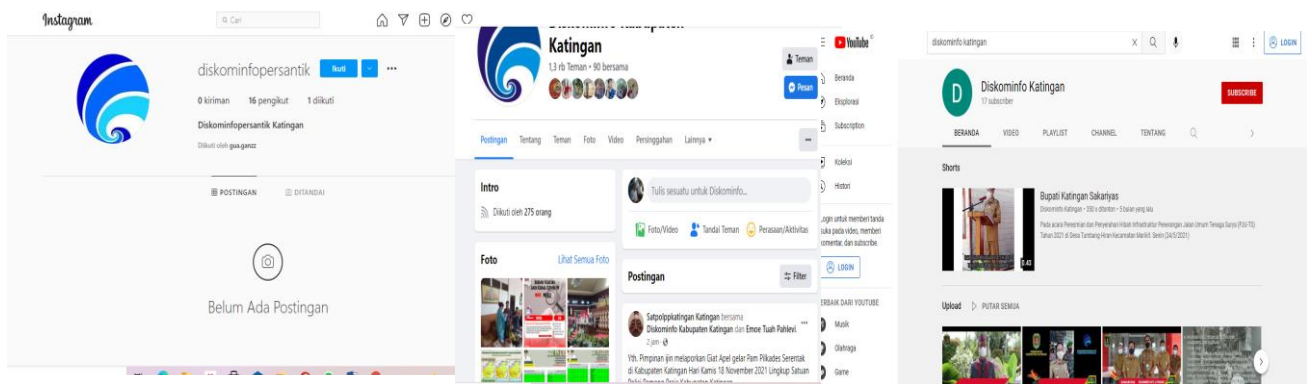
b. Media dan Diseminasi

No	Media	Diseminasi
1	Website	diskominfoopersantik.katingakab.go.id https://Portal.katingankab.go.id
2	Media Online	Media Center Facebook Kominfopersantik Instagram Kominfo Youtube Kominfo ppid.kabupaten Katingan.go.id
3	Spanduk	E-Lapor
4	Stiker	Stunting
5	Booklet / Leaflet	Ruang Layanan PPID Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu Jam Pelayanan Informasi Daftar Informasi Publik
6	Buku	Buku Katingan Dalam Angka Buku PDRB

1. Portal Katingan (Media dan Diseminasi)



2. Media Online
Instagram, Facebook, Youtube



3. Spanduk E-Lapor



4 Stiker Stunting



5. Leaflet/Booklet



c. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

3 KIM yang terbentuk yaitu :

1. KIM di Kecamatan Katingan Hilir
2. KIM di Kecamatan Katingan Tengah
3. KIM di Kecamatan Sanaman Mantikei

Foto Pembinaan KIM oleh Diskominfoersantik Provinsi Kalimantan Tengah



Foto Pembinaan KIM Kecamatan Katingan Hilir



Foto Pembinaan KIM di Kecamatan Katingan Tengah



Foto Pembinaan KIM di Kecamatan Sanaman Mantikei



d. Akses Jaringan SOPD yang terintegrasi

Tabel 2.3.3
Data Akses Jaringan SOPD yang Terintegrasi

PEMBAGIAN ANDWIDTH 2020

No	Terminating		2020 Addendum		2021	
			BW Corporate Ideal	Comnetz/ Ides Café	BW Corporate Ideal	Comnetz/ Ides Café
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Katingan	FO	5	50	5	100
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan	FO		50		50
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan	FO		50		100
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	FO		150		200
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	FO	30	150	30	150
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah	FO		50		50
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Katingan	FO	5	150	10	100
8	Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Katingan	FO	5	50		100
9	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Pemkab	FO	10	150	10	150
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	FO		50		50
11	Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Katingan	FO		50		50
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Katingan	FO		50		100
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten	FO		50		50
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	FO		50		50
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	FO	5	150	5	100
16	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Katingan	FO	5	150	5	150
17	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten	FO		50		100
18	Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Katingan	FO		50		50
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Katingan	FO		50		50

No	Terminating		2020 Addendum		2021	
			BW Corporate Ideal	Comnetz/ Ides Café	BW Corporate Ideal	Comnetz/ Ides Café
20	Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan	FO	5	50	5	100
21	RSUD Mas Amsyar Kabupaten Katingan	FO		150		100
22	Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Katingan	FO		50		50
23	Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan	FO	30	150	30	200
24	Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan	FO		50		100
25	Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kabupaten Katingan	FO		50		100
26	Kecamatan Katingan Hilir Pemkab Katingan	FO		50		50
27	Kecamatan Kamipang, Desa Baon Bango	FO		50		50
28	Desa Petak Bahandang (Kantor Camat Tasik Payawan)	FO		50		50
29	Kecamatan Pulau malan, Desa Buntut Bali	FO		50		50
30	Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pendahara	FO		50		50
31	Kecamatan Katingan Tengah, Tumbang Samba	FO		50		50
32	Kecamatan Bukit Raya					
33	Kecamatan Katingan Hulu					
34	Kecamatan Petak Malai					
35	Kecamatan Marikit					
36	Kecamatan Sanaman antikei					
37	Kecamatan Mendawai					
38	Kecamatan Katingan Kuala					
TOTAL			100	2350	10	2700

Sumber : Bidang Teknologi Informatika)

Pada Tahun 2020 Jumlah Akses Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 30 (tiga puluh) SOPD dan 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Tengah, dan ada 7 (tujuh) Kecamatan yang belum terintegrasi jaringan internet

e. Aplikasi Pemerintah Daerah

Aplikasi Pemerintah Daerah dimaksud adalah aplikasi layanan yang dipergunakan untuk melaksanakan manajemen internal birokrasi dan pelayanan publik.

Tabel 2.3.4. Aplikasi Pemerintah Daerah dan Publik

NO.	OPD	Aplikasi	Penyedia	Deskripsi	Pengguna	Input	Output	Pengelola	KET
1	Dinas Sosial	SIKS-NG	PUSDATIN KEMENSOSRI	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation	Seluruh OPD Sosial	Verifikasi Validasi Data Penerima Bantuan	- Data BDT (Basis Data Terpadu)	Dinas Sosial Kab. Katingan	Integrasi
							- Data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/Rastra(Beras Sejahtera)		
							Data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)		
							-Data Penerima Bantuan Iuran (PBI), PKH (Program Keluarga Harapan)		
2		E-dth	Konsultan Pajak	Elektronik Data Transaksi Harian	Seluruh OPD	Transaksi Pajak: PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 28	Laporan Pajak	Dinas Sosial Kab. Katingan	
3	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	SITIKA	Dinas Transmigrasi Katingan	Sistem Informasi Transmigrasi Kab. Katingan	Masyarakat	Data Transmigrasi	-Informasi Bidang Ketransmigrasian	Dinas Transmigrasi Katingan	
4	Inspektorat	SIM- TLHP	Inspektorat Katingan	Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat Katingan	Data tindak lanjut hasil pemeriksaan	- Daftar temuan TLHP	Inspektorat Katingan	
							- Daftar Pemantauan TLHP		
							- Status Temuan TLHP		
5	DP3AP2 KB	SIMPONI	Kementerian PPA	Sistem Aplikasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Operator P2TP2A	Data korban kekerasan perempuan dan anak	Data Kasus	Kementerian PPA	Integrasi

6		SIGA Daerah	DP3AP2KB Provinsi Kalteng	Sistem Online Penginputan Data Gender dan anak Kabupaten	Operator SIGA	Data terpilah Gender dan Anak	Data terpilah gender dan anak Kabupaten dan Provinsi		Integrasi
7		E-Visum	BKKBN	Sistem Pelaporan Kegiatan	PKB	Kegiatan	Laporan Kegiatan	BKKBN Kalteng	
8		SIM SDM	BKKBN	Sistem Administrasi Kepegawain	DP3AP2KB	Data Pegawai	Data Pegawai	BKKBN	
9		Aplikasi BKKBN	BKKBN	Sistem Pencatatan dan Pelaporan	DP3AP2KB	Laporan	Laporan	BKKBN	
10		SIGA	BKKBN	Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Pendataan Keluarga	DP3AP2KB	Laporan	laporan	BKKBN	
11		ALADIN	Kementerian Keuangan RI	Aplikasi Pelaporan Keuangan DAK non fisik	DP3AP2KB	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	BPKAD Katingan	
12		OMSPAN	Kementerian Keuangan RI	Aplikasi Pelaporan Keuangan DAK fisik	DP3AP2KB	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	BPKAD Katingan	
13		MORENA	BKKBN	Aplikasi Pelaporan Keuangan DAK Fisik dan Non Fisik	DP3AP2KB	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan	BKKBN Kalteng	
14		SIMBADA	BPKAD Katingan	Aplikasi Pelaporan Barang Milik Daerah	DP3AP2KB	-Data masuk-keluar barang pakai habis	- Laporan Stock Opname	BPKAD Katingan	
						- Data Aset tetap	- Laporan Aset Tetap		
15		SIMPONI	Kementerian Keuangan RI	Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) BPJS PHL Daerah	DP3AP2KB	Potongan BPJS pada Daftar Gaji PHL	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara	DP3AP2KB	
16		SSE	Kementerian Keuangan RI	Surat Setoran Elektronik untuk mendapatkan Kode Billing sebagai portal pembayaran pajak	DP3AP2KB	Kode Billing SSE	Cetakan Kode Billing	DP3AP2KB	
17		E- DTH	Kementerian Keuangan RI	Konsultan Pajak	Seluruh OPD	Elektronik Data Transaksi Harian	Transaksi Pajak: PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 28	DP3AP2KB	

18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK	Dirjen Adminduk	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat umum	Biodata/ Data Kependudukan	Laporan dan Dokumen Kependudukan	Dukcapil Katingan	Integrasi
19		BEnRoller	Dirjen Adminduk	Aplikasi Perakaman Biometric KTP	Masyarakat Umum	Data Biometric Penduduk	Database biometric penduduk	Dukcapil Katingan	Integrasi
20		Bcard Management	Dirjen Adminduk	Aplikasi Pencetakan KTP	Masyarakat Umum	Database Biometric Penduduk	KTP Elektronik	Dukcapil Katingan	Integrasi
21	Bappelitbang	E-PLANNING	Bappelitbang Katingan	Aplikasi Perencanaan Kinerja	Seluruh OPD	RPJMD, RENSTRA, RKPD-RENJA	RENJA tahunan	Bappelitbang Katingan	
22		SIMP2D	Bappelitbang Katingan	Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Seluruh OPD	-Program dan Kegiatan	Realisasi Keuangan dan Fisik	Bappelitbang Katingan	
23		SIMONEV	Bappelitbang Katingan	Sistem Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Seluruh OPD	Data Realisasi keuangan dan fisik RENJA, RENSTRA dan LAKIP	Evaluasi RENJA dan Evaluasi RKPD	Bappelitbang Katingan	
24		SIMDA Keuangan	Bappelitbang Katingan	Sistem Informasi Keuangan Daerah	Seluruh OPD	SPJ	Laporan Keuangan Terperinci	Dinas Sosial Kab. Katingan	Integrasi
25		SIMDA Perencanaan	Bappelitbang Katingan	Sistem Informasi Keuangan Daerah	Seluruh OPD	Renstra dan Renja	RKA dan DPA	Dinas Sosial Kab. Katingan	Integrasi
26		KRISNA	BAPPENAS	APBN	Operator OPD	Usulan DAK	Dokumen DAK	Bappelitbang Katingan	Integrasi
27		SIRENJA	Bappelitbang Katingan	APBD	Operator OPD	Anggaran	Dokumen Renja	Bappelitbang Katingan	
28		SIPD	Bappelitbang Katingan	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Operator OPD	Informasi Pembangunan Daerah	Data SIPD	Bappelitbang	Integrasi
29		TPID	Bappelitbang Katingan	Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Operator OPD	Informasi Bahan Pokok	Informasi Bahan Pokok	Bappelitbang	

30	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	e-Proposal	Kementerian Pertanian	Sistem pengajuan proposal dari daerah ke Pusat mendukung sistem bottom-up planning	OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Indonesia yg menangani sektor pertanian	usulan-usulan daerah berupa proposal	usulan proposal DAK yang telah disetujui/verifikasi oleh Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	
31		Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)	Kementerian Keuangan RI	Sistem untuk menginput kontrak yang berkaitan dengan dana DAK setelah disetujui/verifikasi dari aplikasi DAK Krisna	Seluruh OPD	Input kontrak dana DAK Pertanian	Untuk monitoring Ditjen Perbendaharaan Negara	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	
32		E-FILLING DJP	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Sistem Pelayanan SPT Tahunan dan Billing Pajak	Masyarakat	Data Pajak dan Laporan Harta Kekayaan	Data Pajak dan Laporan Harta Kekayaan	Dirjen Pajak	
33		SIMPONI	Kementerian Keuangan RI	Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) BPJS PHL Daerah	Seluruh OPD	Potongan BPJS pada Daftar Gaji PHL	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara		
34		E- DTH	Kementerian Keuangan RI	Konsultan Pajak	Seluruh OPD	Elektronik Data Transaksi Harian	Transaksi Pajak: PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 28		
35		SIMLUHTAN	BPSDMP Kementerian Pertanian RI	Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian	OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Indonesia yg menangani sektor pertanian	Data ketenagaan penyuluhan, sarana prasarana, lembaga penyuluhan	Database penyuluhan dan kelompok tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	
36		KUSUKA (Perikanan)	Kementerian Pertanian	Sistem penyampaian usulan penerima bantuan dari KKP	DJPT, OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Indonesia yg menangani KP	Usulan penerima bantuan pemerintah sektor kelautan dan perikanan	usulan bantuan yang telah disetujui		
37		JASINDO	JASINDO	Sistem Asuransi Nelayan	DJPT, OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Indonesia yg menangani KP	Usulan bantuan Asuransi nelayan	Asuransi Nelayan		

38		PUPI	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Aplikasi Kartu Nelayan	DJPT, OPD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Indonesia yg menangani KP	Usulan penerima kartu nelayan	Kartu Nelayan		
39	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Edayak	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Edukasi Pemberdayaan Konsumen	Masyarakat	Pengaduan sengketa konsumen	Penyelesaian sengketa	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
40		SIKP	Dirjen Perbendaharaan	UMKM Input Potensial calon penerima KUR	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Data UMKM	Calon Penerima KUR	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
41		ODS	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Online Data Sistem	Koperasi	Data Koperasi	Sertifikat, NIK Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
42		RKB	BNI Pusat	Rumah Kreatif BUMN	Koperasi UMKM	Produk Koperasi dan UMKM	Terpasarkan produk Koperasi UMKM secara online		
43		Sistem Informasi DAK	Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan	Penyampaian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Pasar	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan DAK Pasar		
44		Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)	Kementerian Keuangan RI	Sistem untuk menginput kontrak yang berkaitan dengan dana DAK setelah disetujui/verifikasi dari aplikasi DAK Krisna	Seluruh OPD	Input kontrak dana DAK Pertanian	Untuk monitoring Ditjen Perbendaharaan Negara		
	BKPP								
45		SIMBADA	BPKAD Katingan	Aplikasi Pelaporan Barang Milik Daerah	Seluruh OPD	-Data masuk-keluar barang pakai habis	- Laporan Stock Opname	BPKAD Katingan	
46		SIMPEG	BKPP	Sistem Informasi Kepegawaian	PNS	Data PNS	Rekapitulasi Data PNS	BKPP	
47		Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian - Pengadaan	BKN RI	Aplikasi khusus input data CPNS	Subbid Formasi dan Pengadaan	Data Perorang dan CPNS	SK CPNS		Integrasi

48		E-FORMASI	Kemenpan RB	Aplikasi khusus input usul formasi CPNS dan PPPK	Subbid Formasi dan Pengadaan	Anjab, ABK,Keputusan PNS dan PPPK	Rincian usul CPNS dan PPPK		
49		SIJAPIT	KASN RI	Aplikasi sistem merit yang terintegrasi secara nasional	Subbid Formasi dan Pengadaan	Data pejabat pimpinan dan pengadaan	Usul persetujuan KASN		
50	DISKOMINFO	PPID	Kemdagri	Aplikasi publikasi data/informasi	Seluruh PD	Data / Informasi	Data / Informasi	Diskominfoersantik	Integrasi
51		SIMAYA	Kementerian Kominfo	Sistem Administrasi Perkantoran Maya	Seluruh OPD	Surat masuk dan surat keluar	Surat masuk dan surat keluar	Dinas Kominfo Katingan	Integrasi
52		MAIL	Diskominfoersantik Kab. Katingan	e-mail katingankab.go.id	Seluruh PD	Data / Informasi	Data / Informasi	Diskominfoersantik	
53		E-LAPOR	Kemenpan RB	Aplikasi pelaporan	Seluruh PD	Data / Informasi	Data / Informasi	Diskominfoersantik	Integrasi
54	SETDA	SPSE	LKPP	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Seluruh OPD	-Tender	-Paket Perkerjaan		Integrasi
						-Non Tender	- Laporan/Pencatatan Non Tender/Swakelola	LPSE Katingan	
						- Pencatatan Non Tender			
						- Pencatatan Swakelola			
55		JDIH	Setda (terintegrasi JDIHN)	Aplikasi Dokumentasi Dokumentasi Hukum	Seluruh Masyarakat	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum Setda	Integrasi
56		SIRUP	LKPP	Sistem Perencanaan Umum Pengadaan	Seluruh OPD	- Perencanaan Pengadaan	Pengumuman Perencanaan Umum Pengadaan	LPSE Katingan	Integrasi
57		E- SAKIP Reviu	Kemenpan RB	Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Seluruh OPD	- RPJMD	Evaluasi SAKIP	Bag. Organisasi, SETDA Katingan	
58		LHKPN	Direktorat Dikyanmas Kedepuitan Bidang Pencegahan KPK	Laporan Harta Kekayaan	Masyarakat	LHKPN	Laporan tahunan	Direktorat Dikyanmas Kedepuitan Bidang Pencegahan KPK	

f. Jaringan Komunikasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat.

Perkembangan jaringan komunikasi di Kabupaten Katingan terhadap teknologi informasi yang tinggi ini dengan banyaknya jaringan komunikasi akan membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi dimasyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu.

Tabel 2.3.5 DATA TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI KAB KATINGAN TAHUN 2020

No	Kecamatan	Jumlah	Operator
1	Katingan Kuala	4	PT. Telkomsel/PT. Indosat
2	Mendawai	2	PT. Telkomsel/PT. Indosat
3	Kamipang	1	PT. Telkomsel
4	Tasik Payawan	2	PT. Telkomsel
5	Katingan Hilir	36	PT. Telkomsel/PT. Indosat/PT. Exelcomindo
6	Tewang sangalang Garing	5	PT. Telkomsel/PT. Indosat/PT. Exelcomindo
7	Pulau Malan	2	PT. Telkomsel

No	Kecamatan	Jumlah	Operator
8	Katingan Tengah	8	PT. Telkomsel/PT. Indosat/PT. Exelcomindo
9	Sanaman Mantikei	4	PT. Telkomsel/PT. Indosat/PT. Exelcomindo
10	Marikit	1	PT. Telkomsel
11	Katingan Hulu	1	PT. Telkomsel
	JUMLAH	66	Tower/Menara Bersama atau Perorangan

Tabel 2.3.5 Data Signal Telekomunikasi Kab Katingan Tahun 2020

Nama Kecamatan	Jlh Desa	Kuat	Lemah	Blankspot	(%)
Katingan Kuala	16	12	4	0	75%
Mendawai	7	4	2	1	57%
Kamipang	9	2	3	4	22%
Tasik Payawan	8	4	4	0	50%
Katingan Hilir	8	6	2	0	75%
T. Sanggalang Garing	10	3	7	0	30%
Pulau Malan	14	4	8	2	28%
Katingan Tengah	16	8	5	3	50%
Sanaman Mantikei	14	2	2	10	14%
Marikit	18	5	2	11	27%
Katingan Hulu	23	1	2	20	4%

Nama Kecamatan	Jlh Desa	Kuat	Lemah	Blankspot	(%)
Petak Malai	7	1	0	6	14%
Bukit Raya	11	1	0	10	9%
JUMLAH DESA	161	53	41	67	58,38%
Persentase (%)		32,91%	25,46%	41,61%	100%

i. LAPOR

Pengelolaan Kegiatan LAYANAN ASPIRASI PENGADUANONLINE RAKYAT (LAPOR)

Fitur Anonim & Rahasia
Dapat Melindungi Identitas Pelapor

Ajukan Laporan Anda:

Anonim
Identitas pelapor tidak dapat dilihat oleh pihak terlapor dan publik.

Rahasia
Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.

#BERANILAPOR

LAPOR!

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

ASPIRASI

PERMINTAAN INFORMASI

LAPORAN

Mohon maaf Instagram & Facebook LAPOR! bukan merupakan sarana untuk mengadu. Silahkan sampaikan laporan, aspirasi atau permintaan informasi Anda melalui Website **www.lapor.go.id** SMS ke **1708**

Cara Melapor yang Baik

1. Menuju website www.lapor.go.id dan login

2. Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap

3. Sebutkan waktu dan tempat

4. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

5. Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia

6. Kirimkan laporan dan tunggu laporan diverifikasi

SAMPAIKAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ANDA

SMS ke **1708** dengan format **PALANGKARAYA (SPASI) ISI LAPORAN**

Atau melalui website **www.lapor.go.id**

Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

@Lapor1708

CARA MELAPOR YANG BAIK

1. Menuju website www.lapor.go.id dan login
2. Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap
3. Sebutkan waktu dan tempat
4. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia
6. Kirimkan laporanmu dan tunggu laporan diverifikasi

SMS 1708 @ www.lapor.go.id

Fitur Anonim & Rahasia
Dapat Melindungi Identitas Pelapor

Ajukan Laporan Anda:

Anonim
Identitas pelapor tidak dapat dilihat oleh pihak terlapor dan publik.

Rahasia
Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.

SMS 1708 @ www.lapor.go.id

2. Urusan Persandian dan Statistik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, bergabungnya bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Penyediaan informasi dan data yang akurat, relevan dengan cakupan yang lengkap merupakan kebutuhan yang kita tempatkan pada prioritas yang utama. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi kita untuk terus menggali dan menyediakan informasi/data yang menyangkut potensi wilayah untuk kepentingan pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berlatar belakang statistik.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada belum pernah mengikuti bimtek/pelatihan statistik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah Informasi di lingkungan instansi pemerintah merupakan aset Negara, perlu di kelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian sendiri mau pun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otorisasi.

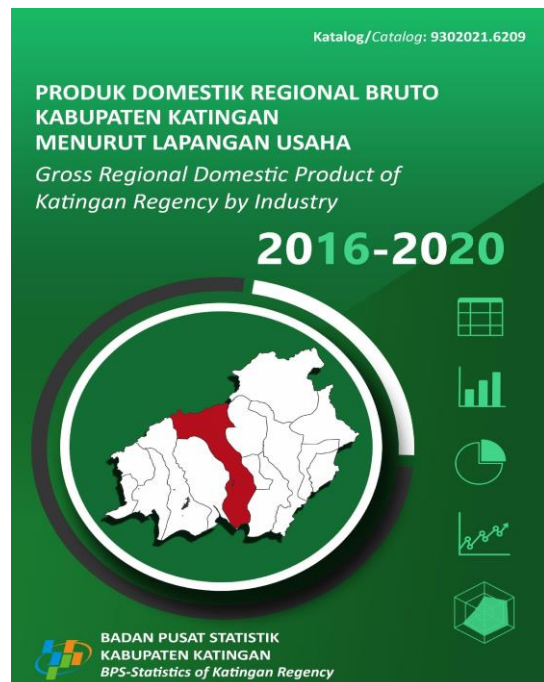
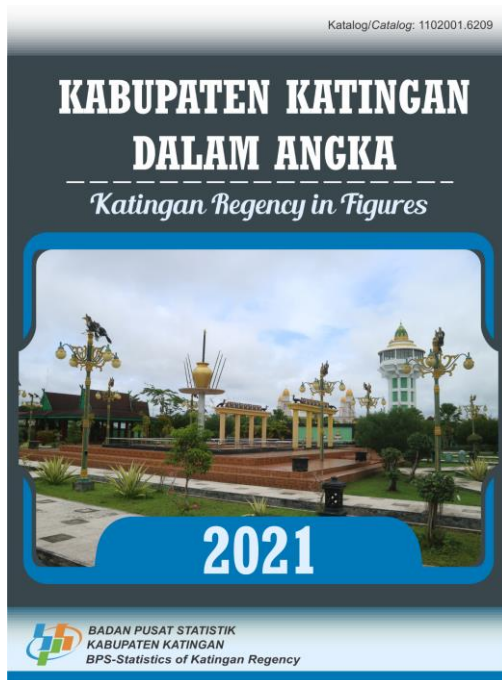
Adapun informasi yang dikelola sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tata Kelola Informasi Berklasifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan organisasi atau institusi.

Pengelolaan informasi berklasifikasi dapat berhasil dengan baik bila didukung dengan komitmen yang tinggi oleh semua aparatur pemerintah untuk sadar dan peduli terhadap keamanan informasi berklasifikasi sehingga informasi tersebut dapat terjaga kerahasiaannya, keutuhannya, keasliannya dan tidak bisa disangkal demi kepentingan, keutuhan dan keamanan negara dan pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum ada Peraturan Bupati Katingan Kabupaten Katingan tentang Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Belum ada Peraturan Bupati Katingan Kabupaten Katingan tentang daftar Informasi Berklasifikasi.
- Belum ada Daftar Informasi yang dikecualikan di masing-masing SOPD.

Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Kabupaten Katingan



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan mengemban tugas-tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi dan untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan analisis terhadap keberadaan SKPD itu sendiri.

Keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dalam mengimplementasikan perannya sebagai pelaksana pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan pelayanan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang partisipasif, holistic dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk menjalankah fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023, serta berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan peluang / potensi / kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan tantangan dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah :

1. Peningkatan penduduk dan perkembangan teknologi dan informasi.
2. Sarana dan prasarana komunikasi, informasi, statistik dan persandian yang masih kurang memadai.
3. Kualitas SDM dalam bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian.
4. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Katingan yang belum terjangkau layanan dalam bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan.
- 2) Makin terjangkaunya prasarana/utilitas pendukung ke seluruh wilayah Kabupaten Katingan.
- 3) Pengembangan Sumber daya manusia yang menjadi modal dasar profesionalisme.
- 4) Dukungan dan komitmen SOPD lain serta pihak legislatif untuk meningkatkan sarana prasarana komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KATINGAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja para pejabat yang ada seperti bangunan gedung kantor yang kurang representative, dan juga kurangnya sumberdaya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kendala yang dihadapi pada Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, antara lain :

1. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya
 - a. Belum maksimalnya kuantitas dan kualitas SDM, baik untuk urusan Komunikasi dan Informatika, maupun untuk urusan Statistik dan Persandian.
 - b. Terbatasnya Sarana/Prasarana, baik untuk urusan Komunikasi dan Informatika, maupun untuk urusan Statistik dan Persandian.
 - c. Terbatasnya Dana / Anggaran, baik untuk urusan Komunikasi dan Informatika, maupun untuk urusan Statistik dan Persandian.
2. Belum maksimalnya Ketersediaan dan Pengelolaan Aplikasi, Tata Laksana Domain/Sub Domain Milik Pemerintah yang berkualitas.
3. Pengelolaan e-Government (pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan pengembangan TIK sebagai sarana penyelenggaraan e-Government menuju smart city.
4. Perlunya Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika.
5. Belum maksimalnya Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Publik.
6. Pengembangan Infrastruktur Statistik dalam rangka Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
7. Belum adanya Regulasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
8. Secara detail, kendala yang ada berupa :

- a. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Katingan yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
- b. Belum maksimalnya pembentukan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) yang ada di Wilayah Kabupaten Katingan.
- c. Belum maksimal terintegrasinya akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK pada SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu ***“Katingan Bermartabat Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”***. **BERMARTABAT (BERBUDAYA, MAJU, RELIGUS, TERINTEGRASI, BEKESINAMBUNGAN, AMAN, DAN TERBUKA)**

MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :

1. Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif Serta Mewujudkan Supermasi Hukum.
2. Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing.
3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan.
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Serta Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.
5. Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, dan Komunikasi.

6. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan.
7. Membangun Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Gotong Royang serta Harmonisasi antar Lapisan Masyarakat dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat, Istiadat, dan Sosial Budaya.

Terkait dengan visi, misi dan program Pemerintah Katingan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam berhubungan dengan pelayanan di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian pada Misi 5 (Lima) “Peningkatan Insfrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, dan Komunikasi.

Besarnya potensi dan letak geografis yang strategis selain merupakan unggulan juga menjadi tantangan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain : masih banyak masyarakat yang belum tersentuh sarana Komunikasi dan Informatika, yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang professional dan mandiri.
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika statistik dan persandian sampai kedaerah/kelurahan yang terisolir.
4. Meningkatkan pengamanan informasi pada setiap SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Terpusatnya jaringan dan aplikasi dalam 1 data.
 - a. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Katingan yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
 - b. Belum optimal terbentuknya KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) yang ada di Wilayah Kabupaten Katingan.
 - c. Belum semuanya terintegrasinya akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK pada SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Prioritas yang ditempuh adalah dengan melakukan penajaman program dan kegiatan serta penyediaan anggaran dalam rangka upaya mengatasi kendala komunikasi dan informatika, statistik, persandian di Kabupaten Katingan. Adapun peluang untuk menangani kendala yang ada adalah :

1. Penambahan sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian
2. Peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Program Kepala Daerah tersaji dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 antara lain yang terkait dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Keterangan
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	Tahun 2018-2020
		Jumlah KIM di Tingkat Kecamatan	Tahun 2018-2020
		Jumlah Kajian di Bidang Komunikasi dan informasi	Tahun 2018-2020
		Jumlah kegiatan penyebarluaran informasi secara langsung kepada masyarakat	Tahun 2018-2020
		Jumlah Lokasi Pendukung Telekomunikasi	Tahun 2018-2020
		Persentase penyampaian data OPD melalui PPID	Tahun 2018-2020
		Jumlah Media Penyebarluasan Informasi	Tahun 2018-2020
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Yang Terpublikasi	Tahun 2018-2020
		Jumlah rapat koordinasi statistik	Tahun 2018-2020
		Jumlah data yang terkelola	Tahun 2018-2020
3	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Penggunaan Sandi Dalam Berkomunikasi	Tahun 2018-2020
4.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah yang di Publikasikan oleh Perangkat Daerah Melalui Website Pemerintah Daerah	Tahun 2021-2023
		Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tahun 2021-2023

		Jumlah Konten Informasi terkait KLA yang sesuai dengan strategi komunikasi	Tahun 2021-2023
		Jumlah Diseminasi dan Layanan Informasi Publik tentang Stunting yang dilaksanakan	Tahun 2021-2023
		Persentase Pengaduan yang terselesaikan	Tahun 2021-2023
		Jumlah KIM yang diberi Penguatan Kapasitasnya	Tahun 2021-2023
		Jumlah Informasi yang Dipublikasikan PPID	Tahun 2021-2023
		Jumlah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Katingan Yang Terpublikasi	Tahun 2021-2023
5.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE	Tahun 2021-2023
		Jumlah Domain Pemerintah Pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah	Tahun 2021-2023
		Persentase Jaringan OPD dan Kecamatan terintegrasi Internet	Tahun 2021-2023
		Jumlah Layanan Publik dan administrasi yang terintegrasi	Tahun 2021-2023
		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan e-government	Tahun 2021-2023
		Jumlah PD yang menggunakan pusat data pemerintah dan jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Tahun 2021-2023
		Persentase Cakupan Layanan telekomunikasi pemerintah daerah	Tahun 2021-2023
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral	Tahun 2020-2023
		Terpublikasinya data statistik sektoral melalui buku Statistik	Tahun 2020-2023
		Persentase data statistik sektoral yang tersinkronisasi, terkumpul, dan teranalisis	Tahun 2020-2023
		Persentase Metadata statistik sektoral yang terbangun dan terpublikasi	Tahun 2022-2023

7.	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indek Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tahun 2022-2023
		Jumlah OPD Informasi yang telah diamankan dengan persandian	Tahun 2022-2023
		Jumlah Kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah	Tahun 2022-2023
		Jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	Tahun 2022-2023

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015–2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

3.3.1. RENSTRA/VISI DAN MISI KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2015–2019
 Visi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan bertujuan meningkatnya dan mengendalikan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi publik.

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada tahun 2013 – 2018 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan Standar Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Penyediaan dan Penyebarluasan data/informasi yang transparan dan akuntabel.

3.3.2. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan pada dasarnya tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu ***“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”***.

Penetapan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan disamping harus berlandaskan pada tugas pokok Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, juga harus mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Visi dan Misi Dinas Kominformersantik, dalam capaiannya merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam betuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kalimantan Tengah.

Kementerian Kominfo Tahun 2015-2019	Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 -2022	DiskominfoPersantik Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
Sasaran Strategis :	Sasaran Strategis :	Sasaran Strategis :
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan eko-sistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya Jumlah PD dan Desa yang terkoneksi Jaringan Internet
	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	
	Tersebarannya informasi berbasis TIK	
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik	
Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif	Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistik	

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Proses telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan dilaksanakan pada tahap penyusunan Renstra SOPD untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SOPD. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berperan dalam strategi pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Katingan.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk KLHS Dinas Kominfo Persantik Kabupaten Katingan tidak memiliki kajian lingkungan hidup terhadap kebijakan rencana dan program daerah yang memiliki dampak lingkungan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam laporan KLHS RPJMD 2018-2023.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Menuju Kabupaten Katingan Smart City.

Merupakan konsep yang diterapkan oleh system pemerintahan untuk mengelola daerah dan kebutuhan pemerintah/masyarakat, terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dimaksudkan untuk penyediaan sarana, jaringan TIK, data monitoring, akses internet gratis dan Master Plan TIK. Indikator kegiatan berupa ; Tersedianya sarana, jaringan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) siap pakai dan bebas kendala, Tersedianya data monitoring, Tersedianya akses internet gratis dan Master Plan TIK Kabupaten Katingan, serta Terintegrasinya aplikasi, jaringan/koneksi dan data antar SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

3. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Publik.

Dimaksudkan untuk melaksanakan dan mengembangkan kerjasama informasi antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan pihak media massa yang bermutu dan berkesinambungan. Indikator kegiatan Berupa ; Pembentukan Tim PPID dan tersusunnya daftar informasi publik, Pembentukan Tim Pengelola Opini dan Aspirasi Publik, Peningkatan dan pemberdayaan KIM, serta Tersedianya informasi publik dan dokumentasi yang berkualitas.

4. Ketersediaan dan Pengelolaan Aplikasi, Domain/Sub Domain Milik Pemerintah yang berkualitas.

Dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi, domain/sub domain milik pemerintah, khususnya milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang bermutu dan tepat guna. Indikator kegiatan Berupa ; Ketersediaan aplikasi milik pemerintah yang berkualitas dan optimalisasi pengelolaan domain/subdomain.

5. Terpusatnya jaringan dan aplikasi dalam 1 data.

Dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik atau informasi tentang perkembangan Kabupaten Katingan pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Katingan pada khususnya. Indikator kegiatan Berupa ; Integrasi jaringan dan Aplikasi 1 data; Ketersediaan Dokumen Data Statistik Sektoral Kabupaten Katingan yang akurat dan aktual.

6. Pengamanan informasi pada setiap SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dimaksudkan untuk meningkatkan penyediaan data persandian yang akurat dan actual. Indikator kegiatan berupa ; Ketersediaan SDM, Ketersediaan Data persandian yang akurat dan aktual, dan Ketersediaan sarana dan prasarana persandian.

B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Penetapan tujuan mengacu pada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2023 dan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Renstra (Rencana Strategis) Diskominfoopersantik Kabupaten Katingan 2018-2023

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemerintah Kabupaten Katingan
Tahun 2019 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Bidang Teknologi dan Informatika Mewujudkan Sistem Informasi yang Terintegrasi, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Jumlah PD dan Desa yang terkoneksi jaringan internet	Persentase Jumlah PD dan Desa yang terkoneksi jaringan internet	49,07	46,48	45,48	43,48	42,24
2	Bidang Pengelolaan Informasi Publik Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indek Layanan Informasi Publik (PPID)	65,62	70,06	74,5	78,94	83,38
3	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Jumlah Layanan Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Komunikasi Publik	3	4	4	5	6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Bidang Statistik dan Persandian Statistik : Meningkatnya Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah terpublikasi	Meningkatnya Persentase Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah terpublikasi	Persentase data statistik sektoral yang tersinkronisasi, terkumpul, dan teranalisis	78,95	84,21	86,84	89,47	92,11
				Persandian : Meningkatnya keamanan serta Fungsi Sandi	Meningkatnya keamanan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	15	25

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, maka perlu adanya strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dengan memperhitungkan beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal, yaitu mengenai faktor-faktor internal yang berupa kekuatan (***Strength***) dan kelemahan (***Weakness***) yang dimiliki serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang (***Opportunity***) dan ancaman (***Threat***) yang memiliki pengaruh terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

5.1. Analisis Lingkungan Internal

5.1.1. Kekuatan (***Strenght***) :

- a. Kejelasan kebijakan tentang status, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2019.
- b. Dukungan dana yang berkesinambungan setiap tahunnya.

5.1.2 Kelemahan (***Weakness***) :

- a. Kuantitas dan kualitas pegawai terutama yang berbasis pendidikan Teknologi Informasi masih terbatas.
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana
- c. Terbatasnya Kesempatan Mengikuti Diklat
- d. Kurang mampu dalam melakukan analisis kebutuhan pembangunan Sistem Informasi.
- e. Sosialiasi dan tindak lanjut kegiatan belum optimal.

5.2 Analisis Lingkungan Eksternal

5.2.1 Peluang (***Opportunity***) :

- a. Meningkatnya kepercayaan dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kepala Daerah
- b. Adanya komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan
- c. Banyaknya lembaga pendidikan formal dan non formal
- d. Era Informasi Teknologi yang sangat mendukung untuk program pelayanan.

- e. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- h. Terbukanya kesempatan kerja sama dengan pihak lain.
- i. Sudah menjadi kebutuhan yang cukup tinggi bagi setiap unit kerja untuk membangun Sistem Informasi.

5.2.2 Ancaman/tantangan (Threat) :

- a. Kurangnya kesadaran/tertib dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) terhadap pentingnya sistem pengamanan komunikasi dan informasi.
- b. Kurangnya tenaga terampil dalam menghadapi era informasi teknologi, dimana tenaga yang berkemampuan IT sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai mana tabel yaitu :

- a. Tujuan Sasaran Stategis dan Kebijakan Sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	Katingan Bermartabat untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera “BERMARTABAT”. (Berbudaya, Maju, Religus, Terintegrasi, Bekerjasama, Aman dan terbuka)		
MISI I	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif Serta Mewujudkan Supermasi Hukum.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keterbukaan Publik	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Mengaktifkan PPID di SOPD untuk berperan aktif dalam Penyebarluasan Informasi
		Meningkatkan Jumlah dan Layanan Informasi	Menyediakan Informasi Secara Up To Date, Serta Menyelenggarakan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Informasi	Mengaktifkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Informasi
		Meningkatkan Fungsi Persandian	Menyediakan Peralatan Sandi yang memadai

MISI V	Peningkatan Insfrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih dan Komunikasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sistem Informasi Yang Terintegrasi, Efektif dan Efisien	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Untuk Mewujudkan Pelaksanaan E-Government	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi	Pemanfaatan Jaringan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Rangka Penyelenggaraan E- Government

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya peningkatan dan pembangunan terus dilakukan pengkajian secara seksama untuk menentukan prioritas yang diharapkan dapat menimbulkan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi serta memulihkan perekonomian masyarakat, upaya tersebut dilakukan dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai suatu kemajuan pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata pembangunan Kabupaten Katingan memerlukan kerangka perencanaan yang terarah tepat sasaran yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan komprehensif.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SOPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah kumpulan kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu untuk capai sasaran tertentu, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, sedangkan kegiatan merupakan proses pelaksanaan aktivitas nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan yang direncanakan untuk periode tahun 2018-2023 dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, diantara :

1. Program Pelayanan Administrasi Umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral

Program Kegiatan Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Tabel 6

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN (TAHUN 2019-2020)**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	60%	60%	2.929.516.947,23	60%	1.519.771.375											
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70%	12 Bulan	412.320.000	12 Bulan	147.000.000											
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	70%	12 Bulan	300.650.000	12 Bulan	228.809.000											
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Bulan Laporan Keuangan Tepat Waktu	80%	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	1.200.000											
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan dan Jenis peralatan kebersihan kantor	80%	12 Bulan	5.362.000	12 Bulan	7.620.000											
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	100%	12 Bulan	85.721.451.80	12 Bulan	62.033.500											
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	80%	12 Bulan	52.750.000	12 Bulan	41.350.000											
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah bulan komponen listrik kantor	80%	12 Bulan	26.543.750	12 Bulan	7.100.000											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	80%	12 Bulan	257.906.250	12 Bulan	6.272.000								
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan surat kabar	70%	12 Bulan	43.320.000	12 Bulan	9.440.000								
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang menerima makanan dan minuman	70%	12 Bulan	66.000.000	12 Bulan	66.000.000								
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	70%	12 Bulan	686.019.495,43	12 Bulan	218.789.875								
					Pembinaan Non PNS	Jumlah Bulan pegawai non PNS yang menerima honorarium	70%	12 Bulan	437.524.000	12 Bulan	499.212.000								
					Penyediaan Papan pengumuman, leaflet, balok, dan sejenisnya	Jumlah Bulan spanduk dan kain umbul-umbul yang tersedia	70%	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	1.500.000								
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70%	12 Bulan	522.000.000	12 Bulan	223.445.000								
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.381.176.480	12 Bulan	56.948.000								
					Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitas Sedang/berat gedung kantor	1 paket	100%	1.356.000.000	1 paket	-								
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Jumlah Bulan servis dan suku cadang alat-alat kantor	80%	12 Bulan	25.176.480	12 Bulan	32.000.000								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023								
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	80%	80%	241.700.000	80%	499.212.000													
								Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Bulan PNS dan NON PNS yang mendapatkan Pakaian Dinas	70%	12 Bulan	241.700.000		499.212.000										
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	12 Bulan	200.000.000	80%	43.600.000										
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100%	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	100%	12 Bulan	200.000.000	80%	43.600.000															
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	B	B	0	B									
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					21.000.000								
Meningkatnya Konvektivitas antar wilayah	Meningkatnya Jumlah PD dan Desa yang terkoneksi Internet	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan untuk mewujudkan pelaksanaan	Persentase PD yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan	53%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase PD yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan	47%	53%	3.739.936.000	60%	3.698.969.000	74%		84%				92%						
								Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan Layanan Komunikasi	48%	11.743.200.000	59%	12.000.000	63%		67%		73%		80%				
								Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kajian di Bidang Komunikasi dan Informasi	7 Keg	150.000.000	-		-		-		-		-				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Penyebarluasan informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat	Cakupan Bulan Kegiatan Penyebarluasan Informasi secara menyeluruh kepada masyarakat		12 Bulan	319.750.000	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pembangunan Integrasi Data	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan Jaringan Internet	37 OPD	37 OPD	1.526.986.000	37 OPD	2.919.249.000								
					Kerjasama dengan Mas Media	Jumlah Kegiatan pembinaan admin website OPD dan media sosial OPD				1 Keg	28.170.000								
					Penguatan Telekomunikasi	Jumlah Lokasi Pendukung Telekomunikasi				2 Lokas	2.400.000.000								
					Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi KIM				3 KIM	116.420.000								
					Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Persentase Penyampaian data OPD pada Aplikasi PPID				50%	43.120.000								
					Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi				3 Media	198.510.000								
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Data /Informasi Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik yang terpublikasi	8%	14%	356.400.000	28%	295.400.000								
					Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik	5 Jenis Buku	5 Jenis Buku	67.500.000	5 Jenis Buku	90.000.000								
					Penyusunan serta Pengumpulan Data Informasi Sektoral	Jumlah Rapat Koordinasi Statistik	1 Tahun	1 Tahun	138.900.000	1 Tahun	205.400.000								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Cakupan Bulan Data yang terkelola	12 Bulan	12 Bulan	150,000.000										
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Sandi	Persentase Penggunaan Sandi dalam Berkomunikasi													

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019
(TAHUN 2021-2023)**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transfaran dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan	100%	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai LAKIP			-	-	-	64%	4.662.041.209	65%	5.281.993.239	70%	5.810.192.562	75%	15.754.206.168
					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan					80%	123.705.000	80%	9.998.000P	80%	155.000.000	80%	160.000.000	
					Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perangkat Daerah					2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	10.000.000	2 Dok	15.000.000	
					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang disusun					2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	10.000.000	2 Dok	15.000.000	
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Cakupan Bulan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran					12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000	
					Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Cakupan Bulan Pelaporan Akhir Tahun					1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	15.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Dok	123.705.000	1 Dok	9.998.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	15.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN OPD					100%	3.505.661.180	100%	3.652.095.151	100%	3.850.400.000	100%	3.950.650.000	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan / Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan	3.505.661.180	12 Bulan	3.652.095.151	12 Bulan	3.850.400.000	12 Bulan	3.950.650.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Sesuai bidangnya					-	-	10 Orang	45.000.000	15 Orang	67.500.000	15 Orang	75.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							10 Orang	45.000.000	15 Orang	67.500.000	15 Orang	75.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase unit kerja internal memperoleh pelayanan administrasi perkantoran							80%	450.703.429	80%	349.954.488	80%	450.000.000,-	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	7.089.159	1 Paket	4.969.452	1 Paket	6.750.000	1 Paket	8.500.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					1 Paket	90.457.900	1 Paket	49.988.963	1 Paket	150.000.000	1 Paket	155.000.000	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	7.519.900	1 Paket	5.038.865	1 Paket	6.500.000	1 Paket	8.540.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	67.997.540	1 Paket	67.997.540	1 Paket	67.997.540	1 Paket	67.997.540	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	71.702.042	1 Paket	50.079.668	1 Paket	60.540.000	1 Paket	75.630.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4 Dokumen	28.317.500	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	30.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	177.620.000	50 Laporan	151.880.000	50 Laporan	165.000.000	50 Laporan	170.000.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase unit kerja internal memperoleh pelayanan administrasi perkantoran							80%	315.600.000					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Mobil							1 Unit	315.600.000					
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								1 Unit	100.000.000				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase unit kerja internal memperoleh pelayanan administrasi perkantoran					80 %	378.516.000	80%	705.890.000	80%	807.900.000	80%	850.950.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	150.600.000	12 Laporan	146.600.000	12 Laporan	150.550.000	12 Laporan	165.780.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	33.870.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	50.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	194.046.000	12 Laporan	539.290.000	12 Laporan	549.650.000	12 Laporan	565.870.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah					80%	203.455.600	80%	249.025.600	80%	283.928.160	80%	294.866.800	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan (Bulan)					17 Unit	203.455.600	17 Unit	203.455.600	17 Unit	278.928.160	17 Unit	284.866.800	
					Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas					-		1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	50.000.000	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Penyelesaian Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indek Layanan Informasi Publik (PPID)	70%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					70%	866.732.617	70%	593.213.217	80%	632.452.000	85%	756.980.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					70%	866.732.617	70%	593.213.217	80%	632.452.000	85%	756.980.000	
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik								1 Dokumen	41.670.000	1 Dokumen	100.000.000		
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik							3 Dokumen	188.000.217	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	250.000.000	
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik							1 Dokumen	80.273.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					1 Dokumen	53.889.580	1 Dokumen	49.995.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	
					Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media							3 Layanan	125.000.000	4 Layanan	130.000.000	4 Layanan	145.000.000	
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya					3 Orang	485.263.184	3 Orang	49.950.000	3 Orang	1000.000.000	3 Orang	150.000.000	
					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah					200 Dok	119.777.853	250 Dok	49.995.000	255 Dok	100.000.000	286 Dok	150.000.000	
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan					4 Kegiatan	207.802.000	4 Kegiatan	175.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	185.000.000	
Mewujudkan Sistem Informasi yang Terintegrasi Secara Efektif dan Efisien	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi	Meningkatnya Jumlah PD yang Terkoneksi Jaringan Internet	Persentase Jumlah PD yang terkoneksi Internet		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah yang diimplementasikan sesuai ketentuan/ketentuan					84	1.385.808.00	90	2.319.381.160	95	2.420.000.00	95	2.670.890.000	
					Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE					50%	4.755.312.02	50%	4.979.406.160	55%	5.325.000.00	60%	5.545.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						1 Dokumen	255.444.000	1 Dokumen	29.500.000	1 Dokumen	128.530	1 Dokumen	130.000.000
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola									3 Satuan	25.000.000	3 Satuan	45.518.000	
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						15 satuan	20.356.160	15 satuan	278.942.240	15 satuan	290.000.000		
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan system Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									1 Layanan	66.900.000	1 Layanan	81.000.000	
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Cerdas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									3 Dok	27.756.102	3 Dok	500.000.000	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									1 Dok	275.201.750	1 Dok	300.000.000	
					Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Pemerintah Pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah					20 Sub Domain	3.369.504.02	20 Sub Domain	2.660.025.000	20 Sub Domain	4.567.000.0	20 Sub Domain	4.650.000.000	
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase PD yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Katingan					80%	3.369.504.02	80%	2.660.025.000	80%	4.567.000.00	80%	4.650.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatnya Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Terpublikasi	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang terintegrasi	Meningkatnya Persentase Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	Persentase Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yang Terpublikasi		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					80%	200.477.027	80%	97.283.872	80%	150.000.000	80%	200.000.000	
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpublikasinya data statistik sektoral melalui buku Statistik													
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1 Dok	200.477.027	1 Dok	47.283.872	1 Dok	100.840.000	1 Dok	100.000.000	
					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun							50 Buku	50.000.000	50 Buku	50.000.000	50 Buku	100.000.000	
Meningkatnya Keamanan Serta Fungsi Sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Sandi	Meningkatnya Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indek Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi antar Perangkat Daerah					70%		70%	99.999.964	70%	150.000.000	70%	200.000.000	
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Informasi yang telah diamankan dengan persandian													
					Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah							1 Dok	49.999.804	1 Dok	75.000.000	1 Dok	100.000.000	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							1 Laporan	49.999.890	1 Laporan	129.040.000	1 Laporan	150.000.000	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan dengan secara rinci langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai konsekuensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan terletak pada beberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi dengan targetnya. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori capaian berikut :

Tabel 7.1. Kategori Rentang Capaian

Urutan	Rentang Capaian	Kategori
I	Sama dengan atau lebih dari 100%	Sangat Berhasil
II	80% s/d 99%	Berhasil
III	Kurang dari 80%	Kurang Berhasil
IV	Lebih kecil dari 55%	Tidak Berhasil

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa capaian kinerja dapat dikategorikan **BERHASIL** apabila target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu agar penanggungjawab program berupaya mencapai sasaran sekurang-kurangnya 100%. Apabila dalam satu sasaran memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.

Indikator yang dimaksud menguraikan tingkat capaian dengan menggunakan tolok ukur kinerja pemerintahan yang dikemukakan baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, sehingga program dan kegiatan dapat dijalankan sebagaimana dalam tabel 7.2. sebagai berikut :

Tabel 7.0 INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KATINGAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KATINGAN

No.	Indikator	Kondisi kinerja awal Periode Renstra Th 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra
			Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase desa yang blankspot (%)	50,31	47,71	41,61	41	40	39,5	39,53

Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KATINGAN

No.	Indikator	Kondisi kinerja awal Periode Renstra Th 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra
			Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Insfrastruktur TIK sesuai Ketentuan (%)	47	53	66	74	84	92	92
Urusan Statistik								
2	Persentase Data Statistik yang Terpublikasi (%)	8	14	28	56	63	83	83
Urusan Persandian								
3	Persentase Penggunaan Sandi Dalam Berkomunikasi (%)	5	15	25	35	45	60	60

Tabel 7.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

SOPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN

No.	Indikator	Kondisi kinerja awal Periode Renstra Th 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir Periode Renstra
			Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Jumlah PD dan Desa yang Terkoneksi Jaringan Internet	51.66	49.07	46.48	45.48	43.48	42.24	42.24
2	Indek Layanan Informasi Publik (PPID)	62.31	65.62	70.06	74.5	78.94	83.36	83.36
3	Jumlah Layanan Komunikasi Publik	3	3	4	4	5	6	6
Urusan Statistik								
4	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersinkronisasi, terkumpul, dan teranalisis	73.8	78.95	84.21	86.84	89.47	92.11	92.11
Urusan Persandian								
5	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	15	25	35	40	45	45

B A B VIII PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2018–2023 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. Penguatan peran serta stakeholders, dalam pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan merupakan dasar evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilannya program dan kegiatan yang ada pada Renstra tersebut perlu didukung oleh anggaran dari APBD, kemampuan SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dalam memproses input dan output yang diterima, perlu adanya koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah di Kabupaten Katingan.

Semoga Perencanaan Strategis (Renstra) yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan mewujudkan visi dan misi instansi khususnya dan visi misi Kabupaten Katingan pada umumnya.



Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Formula Pengukuran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase PD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah kabupaten katingan	80%	Jumlah OPD yang terintegrasi jaringan / Jumlah OPD dan kecamatan x 100%	53%	66%	80%	80%	80%	80%
				Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE	50%	Jumlah PD yang menerapkan SPBE / Jumlah PD x 100%	50%	50%	50%	55%	60%	60%
					Indeks SPBE Kabupaten Katingan	2,1	Indeks SPBE Kabupaten Katingan			2,1	2,3	2,5	2,5
				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat data Pemerintah daerah yang dikelola	3 Satuan	Jumlah Pusat Data			0	0	3 Satuan	3 Satuan
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	15 Satuan	Jumlah Aplikasi				0	15 Satuan	15 Satuan
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Jumlah Layanan					1 Layanan	1 Layanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Formula Pengukuran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program dan Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	3 Dokumen	Jumlah Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen
Meningkatnya Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yang terpublikasi	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang terintegrasi	70%	Meningkatnya Persentase Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yang terpublikasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah / Jumlah OPD x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tingkat Terselenggaranya Kegiatan Statistik Sektoral	85%	Jumlah Buku data statistik yang Terpublikasi / Jumlah Seluruh OPD dan Kecamatan x 100 %	78.95	84.21	86.84	89.47	92.11	92.11
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Tingkat Terselenggaranya Kegiatan Statistik Sektoral	50%	Jumlah Buku data statistik yang Terpublikasi / Jumlah Seluruh OPD dan Kecamatan x 100 %	78.95	84.21	86.84	89.47	92.11	92.11
	Persentase Data Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yang terpublikasi			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Metadata statistik sektoral yang terbangun dan terpublikasi	50%	Jumlah Buku Metadata / Jumlah OPD x 100%			50%	50%	50%	50%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Formula Pengukuran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Meningkatnya Keamanan serta fungsi sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Sandi	50%	Meningkatnya Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	70%	Jumlah penggunaan sandi dalam berkomunikasi/ seluruh penggunaan sandi dalam berkomunikasi yang seharusnya x 100%	15	25	70	70	70	70
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	70%	Penilaian Indeks Keamanan Informasi di Lakukan oleh BSSN di Jakarta					22,2	22,2
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah				1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Indeks Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Jumlah Laporan			1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	100%	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Lakip	B	Nilai Lakip	B	B	B	B	B	B

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Formula Pengukuran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	100%	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Jumlah Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	Jumlah Bagian/Bidang yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah Bagian/Bidang yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1 Unit	Jumlah Unit	0	0	0	1 Unit	0	1 Unit

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Formula Pengukuran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat dan Transfaran dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	100%	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kabupaten / Kota	Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	80%	Jumlah Bagian/Bidang yang melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah / Jumlah Bagian/Bidang yang melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit
				Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 Unit	Jumlah Unit Gendung Kantor	1 Unit	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit